

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, hal ini adalah salah satu bentuk nyata dari *democratic*. Pilkada yang diselenggarakan di Bojonegoro ada empat pasangan calon yang maju yaitu pasangan nomor urut pertama Soehadi Moeljono-Mitro'atin, pasangan nomor urut kedua Mahfudzoh-Kuswiyanto, pasangan nomor urut ketiga Anna Muawanah-Budi Irawanto, dan pasangan nomor urut terakhir Basuki-Pudji Dewanto. Pada tanggal 26 Juni 2018, hasil akhir pemilihan tersebut diumumkan dan dimenangkan oleh pasangan nomor urut ketiga Anna Muawanah dan Budi Irawanto dengan perolehan akhir 236.358 suara¹. Pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto berhasil menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada periode 2018-2023 menggantikan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya yakni Suyoto dan Setyo Hartono yang memimpin selama dua periode.

Melihat latar belakang dari perempuan pertama yang menjadi Bupati Bojonegoro pada periode 2018-2023, Anna Muawanah pada dasarnya sudah memiliki pengalaman politik dilihat dari jabatan sebelum menjadi Bupati yakni pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI pada periode 2004-2009 dan beliau menempati di Komisi XI, selanjutnya pada periode 2009-2014 beliau berada di Komisi IV, dan pada periode 2014-2018, Anna Muawanah kembali duduk di Komisi XI². Sedangkan Budi Irawanto juga memiliki pengalaman politik sebelum menjadi Wakil Bupati yakni pernah menjabat sebagai DPRD Bojonegoro periode 1999-2004, lalu 2009-2014, dan 2014-2018. Kedua pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PKB dan PDIP ini awal kemunculannya mengklaim bisa menjadi cerminan perubahan yang diinginkan oleh warga Bojonegoro, mengingat relasi yang mereka bangun sebelum pemilihan kepala daerah sangat kuat.

Relasi tersebut diperkuat pada saat debat publik yang dilangsungkan di stasiun televisi JTV. Pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto yang mengusung dengan visi “Menjadikan Bojonegoro menuju masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing

¹Sujatmiko, *Calon Usungan PKB dan PDIP Menangi Pilkada Bojonegoro*, dapat diakses di <https://www.google.com/amp/s/pilkada.tempo.co/amp/1104089/calon-usungan-pkb-dan-pdip-menangi-pilkada-bojonegoro>, tanggal 13 November 2021, pukul 10.32 WIB

² Imam Nurcahyo, *Profil Anna Mu'awanah Bupati Bojonegoro yang Pernah Jadi Anggota DPR 3 Periode*, dapat diakses di <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/beritabojonegoro/profil-anna-muawanah-bupati-bojonegoro-yang-pernah-jadi-anggota-dpr-3-periode-1w5oJ99TFQx>, tanggal 13 November 2021, pukul 10.50 WIB

dengan bersumber ekonomi kreatif.” Dari visi yang sudah disampaikan melalui debat publik terdapat 17 program yang menjadi prioritas salah satunya adalah melakukan perbaikan jembatan, jalan, PJU, dan infrastruktur. Dari awal mereka dipasangkan sampai menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro selalu menggunakan dua pilar dalam semangat pembangunannya yaitu “Ngayomi dan Ngopeni.”³ Dua pilar ini bisa dianggap sebagai kekuatan pasangan Anna Muawanah dengan Budi Irawanto sebelum terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam meraup suara.

Berbanding terbalik dengan keharmonisan yang ditampilkan oleh Anna Muawanah dengan Budi Irawanto dalam kampanye pemilihan kepala daerah pada tahun 2018. Selang 3 tahun masa kepemimpinannya yaitu tahun 2021 terjadi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Melihat dari fenomena yang terjadi ialah konflik tersebut terlihat bahwa wakil Bupati Bojonegoro melaporkan Bupati. Pelaporan tersebut karena adanya tindak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro yakni Anna Muawanah kepada Budi Irawanto dan keluarga. Namun, sebelum pelaporan itu terjadi sudah beredar adanya permasalahan mengenai mutasi jabatan di Kabupaten Bojonegoro karena wakil Bupati merasa tidak dilibatkan dan terlihat adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara mereka berdua. Penelitian ini menarik karena di Kabupaten Bojonegoro baru pertama kali mengalami adanya konflik relasi yang melibatkan Bupati dan wakil Bupati dan dilakukan secara terang-terangan.

Terdapat beberapa indikator konflik (1) Pihak yang berkonflik berjumlah dua atau lebih (2) Terdapat aksi yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik seperti saling memusuhi atau tarik-menarik (3) memiliki perilaku yang koersif dalam menghancurkan atau memusuhi musuh (pihak yang berkonflik) (4) Masing-masing pihak memiliki ketegasan sikap, yang mana konflik yang terjadi sampai terdengar atau terdektesi di luar pihak yang berkonflik⁴.

Studi Ilmu Politik memahami bahwa konflik adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari, konflik akan bisa selalu hadir dan ada tanpa di sadari. Politik yang selalu identik dengan kekuasaan, kekuatan, ataupun kepentingan inilah yang bisa leluasa akan menimbulkan konflik karena memiliki tingkat singgung yang sangat tinggi dalam hal perbedaan. Konflik antar Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia biasanya kerap terjadi

³ M Safuan, *Ngayomi dan Ngopeni Pilar Semangat Pembangunan Bojonegoro*, dapat diakses di <https://blokbojonegoro.com/2019/10/20/ngayomi-dan-ngopeni-pilar-semangat-pembangunan-bojonegoro/?m=1>, tanggal 13 November 2021, pukul 11.01 WIB

⁴ Fatah, E. S, *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi*, (Jakarta: Prisma, 1994), hlm. 47.

karena adanya peran Kepala Daerah yang sangat mendominasi ataupun peran personal yang menjadi terlalu kuat, hal inilah yang menyebabkan konflik terjadi. Permasalahan yang kerap menyebabkan banyak keretakan Kepala Daerah dan Wakilnya. Konflik politik bisa dirincikan dengan persaingan, perbedaan pendapat, sampai pertentangan yang dialami kelompok maupun individu⁵. Hamid (2011), konflik Bupati dan wakil Bupati juga pernah terjadi di Kabupaten Sampang, Madura. Didasari dari perbedaan karakter yakni Bupati memiliki latar belakang priyayi dan wakil Bupati memiliki latar belakang kyai-pesantren⁶.

Konflik yang melibatkan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Bojonegoro ini tidak terlepas akan implikasi yang diterima oleh partai naungan/pengusung dari kedua belah tersebut. Partai pengusung yakni PKB dan PDIP sekaligus PKB adalah naungan dari Anna Muawanah dan PDIP adalah naungan dari Budi Irawanto. Mengingat, masa kepemimpinan dari Anna Muawanah dan Budi Irawanto akan usai dan akan diselenggarakannya pemilihan Bupati pada tahun depan, suara dari masyarakatlah yang memberikan pengaruh besar atas perolehan yang akan dicapai.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dengan adanya tantangan yang harus dihadapi, apalagi Indonesia saat ini termasuk sebagai Negara yang berkembang. Tantangan utamanya yakni menciptakan susunan pemerintahan yang baik. Banyaknya persoalan yang datang dalam pemerintahan daerah seperti permasalahan yang personal antar kepala daerah dan wakilnya yang bisa saja memiliki dampak bagi manajemen pemerintahan. Persoalan yang kerap terjadi dalam pemerintahan Indonesia adalah menyangkut kewenangan pada wakil Bupati yang dianggap tidak tentu arah dalam berbagai agenda kerja atau bidang, mengingat Bupati adalah yang menjadi pusat otoritas dalam pemegang kekuasaan di pemerintah daerah.

Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat dijelaskan bagaimana fungsi dan kewenangan Bupati dan wakil Bupati pada Pasal 65 dan Pasal 66. Dalam hal ini, memang dijelaskan bahwa wakil kepala daerah atau bupati mempunyai tugas dan wewenang tersendiri. Tetapi di Kabupaten Bojonegoro kewenangan pemegang otoritas tersentral hanya kepada Bupati selaku kepala

⁵ Cholisin, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 158.

⁶ Abd. Hamid. Thesis: *Dinamika Konflik Politik Lokal: Studi Kasus Hubungan Kelembagaan Antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Periode 2008-2013*. (Surabaya, Universitas Airlangga, 2011)

daerah. Fungsi dan tugas dari seorang wakil Bupati menjadi tidak jelas dalam hal peran yang dimilikinya selama ini, bisa dimaknai bahwa peran wakil Bupati selama ini hanya untuk menjadi pelengkap atau ban serep jika memungkinkan diberikan kewenangan oleh Bupati dalam hal melakukan agenda pemerintahan di kesehariannya.

Jika adanya sebuah konflik yang sedang terjadi, tidak terlepas akan peran dari pihak ketiga atau penengah untuk meredakan permasalahan. Permasalahan sebesar ini dan konflik yang melibatkan kedua orang yang penting di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ini menjadi permasalahan yang serius jika tidak diatasi dengan baik. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan *Contending* (Menghadapi Persoalan), *Problem Solving* (Pemecah Masalah), *Yielding* (Mengalah), *Withdrawing* (Menarik Diri), dan *Inaction* (Diam).

Bupati dan Wakilnya sejatinya terhubung dalam satu kotak yang bersifat kolektif dalam kepemimpinannya. Komitmen dari masing-masing individu dan kinerja tim yang baik tentunya tidak akan menyebabkan keretakan. Perseteruan yang terjadi secara terbuka dan terang-terangan antara Anna Muawanah dengan Budi Irawanto tentunya sangat disayangkan. Bisa dilihat bahwa komunikasi yang terjalin antar keduanya juga sangat kurang, hal tersebutlah yang menyebabkan hubungan keduanya tidak membaik, padahal dengan adanya komunikasi bisa disebut sebagai kunci persoalan jika dijalankan dengan baik dan benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah disampaikan, maka permasalahan tersebut akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro?
2. Apa implikasi dari konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro terhadap relasi antar partai pengusung?
3. Siapa yang menjadi penengah dalam konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro
2. Untuk mengetahui implikasi dari konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro terhadap relasi partai pengusung

3. Untuk mengetahui pihak yang menjadi penengah dalam konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Menjadi bahan acuan untuk lebih memahami konflik yang terjadi dalam pemerintahan antara Bupati dan wakil Bupati. Terlepas dalam hal itu tentunya terdapat upaya untuk mengembangkan keilmuan di bidang politik dan memperkaya penelitian di Ilmu Politik. Diharap dalam penelitian ini bisa menjadi pengembang penelitian-penelitian lain yang selaras dengan topik ini sehingga lebih memperkaya ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil yang di dapat dalam penelitian ini diharap bisa menjadi bahan acuan untuk lebih jeli dalam memahami konflik politik yang terjadi dalam instansi pemerintah daerah dan bisa menjadi rujukan bagi khalayak umum jika ingin lebih memahami konflik antar kepala daerah dan wakilnya yang terjadi dalam rumpun politik. Sebagaimana yang dimaksud bahwa rumpun politik sangat luas dan dalam pembelajaran dibutuhkan pemahaman yang baik. Diharap bisa berguna bagi khalayak umum agar dengan mudah memahami hasil dari penelitian ini.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Konflik Politik

Politik selalu memiliki kaitan dengan namanya kekuasaan, dan kekuasaan memiliki kaitan yang erat dengan relasi. Jika terdapat relasi tentunya pasti terdapat kekuasaan⁷. Sebuah konflik bisa dikatakan menjadi pemicu awal dari keretakan dalam sebuah relasi, konflik politik selalu berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan tersebut selalu bertentangan antara kedua belah pihak atau kelompok. Hal ini konflik selalu bertujuan kearah kesepakatan (consensus). Ramlan (2015), di Ilmu Politik konflik juga bisa dikaitkan konflik pertentangan, persaingan yang mana kelompok dengan individu, individu dengan individu, atau kelompok dengan pemerintah⁸.

Konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati bisa dikategorikan sebagai konflik persaingan antar individu. Dalam konflik politik kedua belah pihak akan berjuang

⁷ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Jakarta: Bentang Budaya, 2002)

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), hlm 191.

untuk mempertahankan sumber tetapi tidak dengan kekerasan. Konflik juga terdapat dua macam yakni konflik dengan menggunakan kekerasan dan konflik yang tidak menggunakan kekerasan di dalamnya⁹. Situasi Konflik bisa dibedakan dengan dua cara yakni konflik menang-menang (non-zero-sum conflict) dan konflik menang kalah (zero-sum conflict. Konflik menang-menang yakni kedua belah pihak atau kelompok yang berkonflik masih memiliki peluang untuk bekerja sama dan mengadakan kompromi sedangkan konflik menang-kalah bisa dianggap konflik yang memiliki sifat yang sangat antagonistic karena tidak akan memiliki peluang untuk mencapai kerjasama atau kompromi¹⁰.

Konflik juga memiliki 5 jenis menyebutkan bahwa yang pertama adalah konflik Intrapersonal, konflik ini adalah permasalahan yang terjadi dengan dirinya sendiri dan seseorang, maka puncaknya konflik ada pada kedua belah pihak yang sama-sama memiliki keinginan penuh. Kedua, konflik interpersonal yakni konflik yang menyangkut orang lain dan seseorang, konflik ini muncul ketika dua-duanya memiliki pertentangan mengenai keinginan maupun pertentangan yang sulit dihindari. Ketiga, Konflik yang terjadi pada kelompok dengan kelompok maupun individu dengan individu, yang mana konflik ini bisa muncul karena adanya sebuah konformitas. Konformitas sendiri memiliki artian bahwa pihak-pihak yang tergabung dalam sebuah kelompok harus bisa melakukan penyuaian dirinya terhadap norma-norma yang ada di dalam kelompok tersebut. Konflik ini sering terjadi jika ada penekanan yang dilakukan oleh kelompok kerja mereka sendiri. Keempat, konflik yang terjadi pada sebuah kelompok yang berada di dalam organisasi yang sama. Konflik ini kerap terjadi pada staf maupun lini. Terakhir, konflik yang terjadi antar organisasi.¹¹

1.5.2 Kekuasaan

Kata kekuasaan sering terdengar pada rumpun Ilmu Politik. Sangat sulit mengetahui apa sebenarnya kekuasaan itu terlepas dari makna sebenarnya kekuasaan karena kekuasaan memiliki banyak definisi maupun tafsiran dan definisi dari kekuasaan bisa kelompokan menjadi dua yakni kekuasaan sebagai pengaruh maupun kekuasaan dianggap sebagai kekuatan, pengelompokan itu dilakukan karena dua tersebut lebih sering ada pada kebanyakan literature ilmu politik maupun di ilmu pemerintahan¹². Kekuasaan bisa diartikan sekelompok atau seseorang yang bisa memberikan pengaruh atas tingkah laku seseorang

⁹ *Ibid*, hlm. 191

¹⁰ *Ibid*, hlm. 196-197.

¹¹ Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi*, (Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2014) hlm. 46-45

¹² Muhtar Haboddin. *Memahami Kekuasaan Politik*. (Malang: UB Press, 2017), hlm. 4

maupun kelompok menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemegang kekuasaan tersebut. Adapun tafsir yang mengatakan bahwa “kekuatan” adalah kekuasaan dan “pengaruh” bisa menjadi kekuasaan. Kekuasaan bisa diartikan sebagai dominansi pihak-pihak terhadap pihak-pihak lainnya, dominasi disinilah yang menjadi kekuasaan menjadi kekuatan. Kekuasaan lebih sering ada pada ranah Lembaga pemerintahan jika dilihat dari segi kaca mata pengkaji politik tradisional institusional. Foucault juga memberikan pemikirannya mengenai kekuasaannya yakni dalam relasi sosial tidak terlepas akan kekuasaan dan dalam hal ini kekuasaan ada dimanapun karena kekuasaan melekat pada interaksi sosial yang terjalin pada seorang individu.

Kekuasaan dalam Ilmu Politik bisa dianggap mempelajari kedudukan, hakikat, sampai penggunaan kekuasaannya. Penggunaan kekuasaannya bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan kekuasaan itu ditemukan. Lingkup kekuasaan bisa datang dari mempelajari ruang lingkup, hakikat, sifat, proses-proses, hasil dari kekuasaan, dan dasar. Ramlan (2015), Kekuasaan yang ada bisa dilihat dari pengaruh maupun dipengaruhi, dua hal tersebut tidak bisa jauh dari yang namanya kekuasaan, atau bisa terdapat pihak satu yang mempengaruhi lalu adapun pihak-pihak lainnya yang mematuhi.¹³

Kekuasaan menjadi pilar utama dari Ilmu Politik, adapun delapan alasan yang mendasarinya. Pertama, karena dalam ilmu politik selalu berkaitan erat dengan bentuk peraturan dan wewenang maupun memiliki pengaruh dan yang berpengaruh ataupun penggunaan kekuasaannya. Kedua, sejak zaman Yunani Kuno para ilmuwan sering menganggap kekuasaan sebagai unsur yang penting bagi tindakan politik mengingat dalam mempelajari Ilmu Politik tidak hanya membahas mengenai kekuasaan tetapi cara mempertahankan kekuasaan juga. Ketiga, dari banyaknya konsep-konsep di dalam Ilmu Politik yang kerap dibahas adalah kekuasaan karena itu menjadi pemahaman yang sangat krusial. Keempat, dalam Ilmu Politik kekuasaan bisa dikatakan sebagai konsep yang mendasar karena dalam kekuasaan bisa mendasari sebuah bentuk relasi-relasi sosial. Kelima, jika memiliki pikiran mengenai pemerintahan, tentu saja tidak terlepas dengan ingatan kekuasaan. Keenam, tidak terlalu memberikan ekspresi yang berlebihan ketika membicarakan perihal kekuasaan dalam Ilmu Politik karena kekuasaan bisa dikatakan aspek yang penting.

¹³ Ramlan, *op. cit.* hlm. 7

Ketujuh, politik memiliki sifat yang bisa dikaitkan dengan kekuasaan. Terakhir, terdapat konsep kunci yakni kekuasaan bisa saja disebut dengan kekuasaan politik.¹⁴

Wacana kekuasaan sering diutarakan oleh Niccolo Machiavelli maupun Max Weber dalam hal ini kedua figure ini memiliki banyak pemikiran mengenai kekuasaan. Tulisan-tulisan dari Machiavelli maupun Weber adalah merujuk pada penggabungan dari teori yang dalam dan sangat luas.¹⁵ Weber dalam pemikirannya mengenai kekuasaan yakni memiliki makna bahwa kelompok maupun seseorang memiliki kesempatan untuk mewujudkan seluruh apa yang diinginkannya yang dikemas dalam bentuk aksi sosial, begitu pula dalam mewujudkannya tidak peduli bahwa mereka menentang maupun mengikutinya. Definisi tersebut memiliki point yang penting yakni kekuasaan lebih mengarah ke tindakan seseorang. Para pemimpin memiliki tindakan politik yang tentu saja akan mengarah pada motivasi maupun tujuan dalam mendapatkan sebuah kekuasaan. Weber mengemasnya dengan singkat yakni kekuasaan itu adalah kelompok maupun seseorang yang memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada diri orang lain walaupun kehendaknya banyak menimbulkan perlawanan¹⁶.

Konsep politik yang membahas mengenai kekuasaan dari mempertahankan maupun mencari kekuasaan terdapat kelemahan di dalamnya, diantaranya; konsep dalam politik selain kekuasaan adalah legitimasi, kewenangan, kebijakan umum, ideologi, integrasi politik, konsesus, dan konflik. Politik jika dikatakan sebagai mempertahankan kekuasaan maupun mencari kekuasaan dianggap sebagai fokus yang kurang tajam dan menyeluruh kelemahan yang kedua adalah banyak yang belum bisa membedakan mengenai kekuasaan yang memiliki aspek dalam politik maupun aspek yang tidak dalam politik.

1.5.3 Kewenangan

Terdapat ciri khas dari kewenangan, konsep ini mengungkapkan bahwa setiap ada kekuasaan tentu terdapat kewenangan di dalamnya. Kekuasaan dalam hal ini berarti adanya bentuk relasi yang terjalin dan terdapat dua pihak yakni yang memiliki kuasa untuk memerintah dan pihak yang diperintah¹⁷. Kewenangan sering memiliki keterkaitan dengan kekuasaan, dalam pemerintahan pihak yang memiliki kekuasaan yang formal adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, bisa dijabarkan bahwa terdapat dua aspek

¹⁴ *Ibid* hlm. 2-3

¹⁵ *Ibid*. hlm. 18

¹⁶ *Ibid*. hlm. 23-24

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 35.

yang penting dalam kekuasaan yakni aspek yang dilihat dari segi hukum dan dilihat pada aspek politik. Tetapi jika dari kewenangan hanya berpaku pada hukum karena kewenangan akan memiliki fokus hanya terhadap konstitusi saja.

Dilihat secara terminologis maka istilah dari wewenang kerap kali di sandingkan oleh kalimat “*bevoegheid*” yang memiliki artian kompetensi¹⁸. Dalam hal ini terdapat perbedaan makna dari kewenangan dan wewenang, wewenang disini memiliki artian sebagai dalam melakukan setiap kegiatan atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum publik tentunya terdapat kekuasaan sedangkan kewenangan memiliki makna kekuasaan yang sudah tercantum di undang-undang, bisa dikatakan bahwa setiap kewenangan di dalamnya pasti terdapat wewenang¹⁹. Kewenangan memiliki fokus pada hak, diantaranya hak dalam berwenang dan hak atas kekuasaan jika ingin berbuat yang diinginkan. Wewenang dalam pemerintahan memiliki substansi yakni melakukan atau melihat perbuatan maupun kemampuan dalam hukum pemerintahan.

Dalam literatur ilmu politik kerap kali terdengar tatkala membahas seputar kekuasaan, kewenangan, sampai wewenang. Kewenangan dan wewenang jika melihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sering disamakan, namun tentunya kewenangan dan wewenang memiliki makna yang sangat berbeda jika dilihat dalam sudut manapun. Kalimat “kewenangan” dan “wewenang” sama-sama berasal dari kalimat pendek “wewenang” dan dalam hal ini kalimat wewenang tersebut berbentuk noun (tunggal). Wewenang memiliki artian sebagai hak maupun kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau bertindak; kewenangan. Lalu arti dari kewenangan sendiri dalam hal ini memiliki makna:

1. Hak berwenang
2. Memiliki atau mempunyai kekuasaan maupun hak dalam melakukan tindakan sesuatu.

Kalimat wewenang dalam hukum Belanda sering diujarkan dengan “*bevoegheid*” yakni kata benda. Memang dalam Bahasa Belanda kerap disebut “*bevoegheid*” namun banyak juga yang menerjemahkan “*bevoegheid*” memiliki artian kompetensi ataupun kewenangan. Dalam hal ini kekuasaan formal ada pada Kewenangan yang sudah sah seperti kewenangan

¹⁸ Ridwan H.R, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 110-111.

¹⁹ Nandang Alamsyah, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017), hlm. 7

yang diperoleh dari Undang-Undang, dan wewenang sendiri bisa dikatakan sebagai “*onderdeel*” yang mana hanya berupa bagian tertentu dari sebuah kewenangan.²⁰

H.D Stoud menyampaikan wewenang memiliki bentuk arti dari “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer.*” Yang memiliki artian wewenang sebagai bentuk dari seluruh aturan-aturan yang ada, aturan tersebut saling singgung dengan penggunaan maupun perolehan wewenang dari pemerintah oleh subjek hukum publik.²¹ Lalu juga terdapat Robert Bierstedt yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya mengungkapkan bahwa authority atau wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan maknanya adalah memiliki hak menguasai selain kekuasaan *de facto*. Lalu tokoh Abraham Kaplan dan Harold D. Lasswell memiliki pendapat yang serupa yakni wewenang memiliki artian formal power (kekuasaan yang formal)

Kewenangan terdapat beberapa wewenang-wewenang yakni *rechtsbevoegdheden*. Wewenang *rechtsbevoegdheden* ini ada beberapa lingkup diantaranya lingkup wewenang pemerintahan, lingkup tindakan hukum publik, lalu meliputi dari wewenang (bestuur) yakni wewenang yang memiliki dalam membuat sebuah keputusan pemerintah, selanjutnya wewenang dalam pendistribusian wewenang yang sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan, dan wewenang pada pelaksanaan tugasnya. Dalam hukum sendiri, wewenang memiliki artian yakni kewajiban dan hak tau disebut *rechten en plichten*. Lalu kewenangan sendiri adalah kekuasaan yang formal.

Kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan karena hal tersebut adalah bentuk dari ciri khas yang dimiliki suatu negara. Namun, terdapat perbedaan mengenai kewenangan dan kekuasaan, dalam hal ini kewenangan yakni memiliki bentuk kekuasaan yang absah, sedangkan kekuasaan sendiri tidak sering memiliki sebuah bentuk kewenangan atau tidak absah. Kekuasaan sebenarnya memiliki artian yakni “*the rule and the ruled*” yang memiliki makna terdapat pihak yang bertanggung jawab untuk memerintah dan terdapat pihak yang diperintah. Kekuasaan sediripun memiliki dua aspek, aspeknya adalah yang memiliki hubungan dengan hukum maupun tidak memiliki kaitan apapun. Kekuasaan yang memiliki keterikatan dengan hukum menurut Max Weber adalah wewenang yang legal atau rasional maknanya adalah kekuasaan yang memiliki keterikatan hukum dipahami sebagai kaidah-

²⁰ *Ibid.* hlm. 4

²¹ *Ibid.* hlm. 9

kaidah yang mempunyai legalitas atau diakui oleh seluruh masyarakat, dan Negara sudah memperkuat hal itu. Sedangkan juga terdapat kekuasaan yang tidak memiliki keterikatan dengan hukum menurut Henc van Maarseven yakni dinamai dengan “*blote match*”, namun sepenuhnya wewenang selalu berdasar pada hukum.²²

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Konflik

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004) mengungkapkan bahwa konflik dapat diartikan sebagai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau kepercayaan dari pihak yang berkonflik tidak bisa dicapai secara simultan²³. Kepentingan bisa bermakna untuk melihat perasaan orang mengenai apa yang ia inginkan atau capai. Adapun dimensi yang digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan dari kepentingan, diantaranya, beberapa kepentingan tersebut memiliki sifat yang universal diantaranya seperti identitas, restu sosial, rasa aman, harkat kemanusiaan yang mengarah pada fisik, dan kebahagiaan²⁴.

Kepentingan yang memiliki sifat yang lebih krusial yakni memiliki prioritas yang tinggi, kepentingan bagi pelaku tertentu contohnya seperti warga palestina yang berkeinginan memiliki tanah air, dan tingkat priotas yang berbeda dengan masing-masing orang²⁵. Dalam hal ini, memang tidak dipungkiri bahwa suatu kepentingan bisa menjadi salah satu faktor munculnya konflik.

Kebanyakan orang hanya mengapresiasi bentuk kecil dari objek yang dianggap bernilai. Jika tidak, bisa saja orang-orang terlibat konflik seperti menginginkan mobilmu, rumahmu, dan sebagainya²⁶. Jika aspirasi bangkit lalu mengakibatkan konflik karena muncul salah satu dari dua alasan yakni masing-masing pihak *mampu* untuk mendapatkan objek yang bernilai untuk dirinya sendiri (realistis), selanjutnya mereka pihak-pihak yang berkonflik percaya bahwa mereka *berhak* memiliki objek tersebut (idealis). Sumber-sumber konflik menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004) diantaranya;

a. Prestasi Masa Lalu

Terdapat pertimbangan realistis yang dianggap penting dalam apa yang sudah dicapai pada masa yang lalu: apresiasi akan bangkit ketika prestasi meningkat dan jatuh ketika

²² *Ibid.* hlm. 9

²³ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm. 21

²⁴ *Ibid.* Hlm. 21

²⁵ *Ibid.* Hlm. 21-22

²⁶ *Ibid.* Hlm. 28

prestasi menurun. Penyebabnya adalah orang merasa lebih berprestasi ketika segala sesuatu bertambah baik dan kurang berprestasi ketika sesuatu bertambah buruk. Hal ini dilihat dari aspirasi yang meningkat, lalu mereka juga bisa menunjukkan sikap semakin berlawanan dengan aspirasi pihak lain. Dan ini memunculkan dan membentuk situasi konflik.²⁷

b. Persepsi Mengenai Kekuasaan

Aspirasi dapat meningkat dan menurun untuk alasan yang bisa dikatakan realistis. Seperti ketika seseorang bertemu dengan sebuah kelompok atau perseorangan yang sumber dayanya berharga tetapi lebih lemah dari dirinya sendiri. Bila aspirasi dirinya sendiri meningkat sedangkan aspirasi pihak lain tidak menurun secara bersamaan maka bisa mengakibatkan konflik yang memiliki sifat eksploitatif²⁸.

Konflik yang memiliki sifat eksploitatif ini membuat orang biasanya meredakan rasa bersalah mereka dengan membuat rasionalisasi. Konflik biasanya muncul ketika adanya ambiguitas pada sifat kekuasaan, sehingga pihak satu dan pihak lainnya bisa menyimpulkan bahwa pemikiran mereka mengarah pada pemikiran yang penuh harap (pihaknya lebih kuat daripada pihak lainnya)²⁹.

c. Aturan dan Norma

Kelompok maupun masyarakat secara konstan mengembangkan aturan-aturan untuk mengatur sikap maupun perilaku dari anggotanya. Aturan tersebut bisa disebut dengan norma. Thibaut dan Kelly (1959) dalam Pruitt dan Rubin (2004), aturan tersebut memiliki fungsi yang utama yaitu untuk mengantisipasi pihak oposan sehingga meminimalisir kemungkinan munculnya konflik³⁰.

Konflik bisa relevan dengan norma karena norma bisa digunakan untuk menetapkan hasil yang sesuai atau berhak diterima oleh seseorang lalu digunakan untuk menentukan aspirasi apa yang akan menjadi haknya. Adanya aspirasi yang sesuai namun tidak sejalan dengan tujuan dari pihak lain, maka hasil yang didapat mengarah pada eksplosif. Simpulannya, konflik kerap terjadi pada norma sosial yang ada di keadaan yang lemah³¹.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 28

²⁸ *Ibid.* Hlm. 30

²⁹ *Ibid.* Hlm. 31

³⁰ *Ibid.* Hlm. 31

³¹ *Ibid.* Hlm. 32

d. Perbandingan dengan Orang Lain

Sebagian orang kerap mengidentifikasi dirinya sendiri sendiri dengan orang lain atau anggota kelompok yang lain yang memiliki hubungan kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya sendiri. Jika kelompok tersebut lebih baik atau lebih maju dari kelompoknya sendiri bisa memunculkan aspirasi bagi dirinya sendiri karena adanya pengaruh stimulasi yang bisa mengarah pada munculnya konflik³².

e. Terbentuknya Kelompok Pejuang (*Struggle Group*)

Beberapa orang yang memiliki kepentingan laten sedang melakukan interaksi seperti bertukar pikiran ataupun berbincang, maka bisa memunculkan kesadaran. Adanya keyakinan dari pendirian masing-masing, hal itulah yang memunculkan aspirasi yang baru dan bisa mengakibatkan konflik karena bertentangan dengan aspirasi pihak lain. Konflik seperti itu muncul ketika pihak satu dan pihak lainnya mulai mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang berbeda dengan kelompok lainnya. Aspirasi yang memiliki kesamaan bisa berubah menjadi norma kelompok maupun kepemilikan aspirasi menjadi manifestasi kesetiaan pada kelompok.³³

Aspirasi yang tinggi juga bukan salah satu yang menyebabkan orang terlibat konflik, suatu pihak harus percaya jika pihak lain juga memiliki aspirasi yang tinggi juga, dan ini tidak memungkinkan pihak satu dan pihak lainnya mencapai aspirasi masing-masing. Jika aspirasi pihak lain rendah, maka pihak bersangkutan merasa tidak sebagai ancaman dan tidak menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan yang terjadi kerap menimbulkan impuls-impuls yang agresif dan membuat suatu pihak melakukan apa yang menjadi kemauannya sendiri³⁴.

Konflik dalam artian memiliki perbedaan persepsi yang menjurus kepada kepentingan, bisa menjadikan antagonism ringan. Disebabkan oleh, seseorang yang merasa jauh dan berlawanan dengan orang-orang yang berbeda kepentingan³⁵. Di dalam konflik yang bereskalasi, ada isu-isu yang dianggap spesifik namun berubah menjadi isu-isu yang umum. Hubungan yang terjalin antar belah pihak mengalami kemunduran yang bersifat umum.

³² *Ibid.* Hlm. 32

³³ *Ibid.* Hlm. 34

³⁴ *Ibid.* Hlm. 35

³⁵ *Ibid.* Hlm. 156

Kebanyakan pihak merasa hanya berusaha untuk kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan dampak baik buruknya yang akan terjadi pada orang lain.

Pruitt dan Gahagan (1974) dalam Pruitt dan Rubin (2004), Teori yang membahas mengenai konflik eskalasi condong ke dalam salah satu dari tiga model konflik yang umum yakni model *aggressor-defender*, model *spiral-konflik*, dan model *perubahan-struktural*³⁶. Model perubahan struktural lebih mengarah dalam menjelaskan konflik dan taktik-taktik yang akan digunakan untuk mengatasinya, lalu menghasilkan residu. Residu dalam hal ini memiliki artian perubahan-perubahan baik pada pihak-pihak yang sedang berkonflik. Konflik yang bereskalasi bisa disebut *anteseden* sekaligus *konsekuen*.³⁷

Pada perubahan struktural dapat dibedakan pada perubahan psikologis, perubahan dalam kelompok kolektif lainnya, dan perubahan dalam masyarakat sekeliling pihak yang sedang mengalami konflik³⁸. Perubahan psikologis lebih mengarah pada saat adanya konflik eskalasi, persepsi maupun sifat negatif akan muncul dan berkembang pada lawan seperti tidak sehat secara moral, memikirkan diri sendiri lebih kedalam kasus yang ekstrem (*jahat*). Harga diri, ketakutan, dan amarah menjadi faktor pemicu emosi yang dominan. Tujuan muncul yaitu menghukum mendiskreditkan, merusak lawan, sampai mengalahkan. Hal ini muncul karena kemampuan untuk berempati terhadap lawan berkurang³⁹.

Perubahan psikologis yang kerap dijadikan subjek penelitian banyak orang yakni keinginan untuk menghukum (melakukan agresi terhadap) pihak lain, sikap dan persepsi *negative*, dan *deindividuasi*. Pertama, Keinginan untuk menghukum (melakukan agresi terhadap) pihak lain. Penelitian menggunakan topik ini lebih pada akibat pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, contohnya *deprivasi*, perilaku tidak adil, kegagalan mencapai aspirasi, penderitaan, maupun sebagainya. Pengalaman semacam ini kerap muncul jika pihak lain melakukan tindakan *contentious*⁴⁰. Kedua, sikap dan persepsi negatif yakni sikap ini muncul disebabkan oleh taktik-taktik *contentious* (*suka bertengkar*). Oleh karenanya, sikap dan persepsi merupakan pengaruh pada eskalasi konflik. Jika suatu pihak melakukan tindakan *contentious* pada pihak lain, maka itu bisa mendorong pihak lain juga untuk melakukan tindakan *contentious* di masa yang datang dan ini terkadang lebih berat.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 200

³⁷ *Ibid.* Hlm. 206

³⁸ *Ibid.* Hlm. 206-207

³⁹ *Ibid.* Hlm. 208

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 215

Yang terakhir, Deindividuasi yakni tahapan dalam peningkatan frekuensi konflik, pemikiran ini dibuat untuk mempermudahnya untuk menerapkan ukuran lebih buruk dari orang lain.

Negara, kelompok, maupun organisasi yang masuk dalam konflik *contentious*, kerap memberikan perubahan terhadap munculnya eskalasi konflik. Perubahan tersebut setidaknya terdapat enam yakni pertama, diskusi yang dilakukan oleh kelompok sering kali mengakibatkan persepsi para anggota kelompok secara individu yang sangat ekstrem (muncul karena polarisasi kelompok)⁴¹. Kedua, perkembangan norma yang tidak terkendali (*runaway norms*) menjurus kepada dukungan pendektakan *contentious* terhadap kontroversi. Ketiga, perkembangan pada tujuan kelompok yang memiliki sifat *contentious* yang muncul pada sebuah konflik bertujuan untuk merusak lawan atau mengalahkannya. Keempat, sumbangan pada eskalasi karena adanya perkembangan dari kohesivitas kelompok (solidaritas). Kelima, terlibatnya pada konflik yang berat, kepemimpinanannya condong pada militan. Keenam, perkembangan kelompok yang lebih militan.

Terdapat dua kelompok yang sedang terlibat konflik besar, sering kali masyarakat sulit untuk berlaku dengan netral. Alasan dibaliknyalah ialah pihak yang terlibat konflik sering mencari atensi kepada masyarakat untuk mendukung maupun menentu mereka untuk “melawan kami ataupun bergabung dengan kami.”⁴² Dalam hal semacam ini, dibutuhkannya pihak ketiga untuk bergabung di salah satu pihak agar bisa pantas menjadi kelompok bertahan (*defender*). Ini bisa dikatakan sebagai polarisasi kelompok.

Terdapat strategi-strategi dalam menghadapi konflik, tindakan dalam menghadapi sebuah konflik bisa dikelompokkan menjadi lima strategi, diantaranya *contending* (menghadapi persoalan), *problem solving* (pemecahan masalah), *yielding* (mengalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam).

a. *Contending* (Menghadapi Persoalan)

Contending memiliki artian berbagai macam usaha yang ditunjukkan guna menyelesaikan sebuah konflik yang sedang terjadi, penyelesaian konflik ini hanya untuk kemauan seseorang saja tanpa memperdulikan kepentingan dari pihak lain. Pruitt dan

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 237

⁴² *Ibid.* Hlm. 243

Rubin (2004) menyampaikan pihak yang menggunakan cara atau taktik ini tetap mempertahankan aspirasinya dan membujuk pihak lain untuk mundur atau mengalah⁴³.

b. *Problem Solving* (Pemecah Masalah)

Problem Solving memiliki artian mengidentifikasi permasalahan yang membuat kedua belah pihak berkonflik serta mengembangkan dan mengarahkan pada solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang sedang berkonflik⁴⁴. Pihak yang sedang berkonflik lalu menerapkan taktik ini memang lebih mempertahankan aspirasinya sendiri, namun memiliki usaha untuk mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. Kesepakatan yang dibuat dalam taktik atau strategi ini adalah kompromi atau bisa berbentuk sebuah solusi integrative (rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak)⁴⁵.

c. *Yielding* (Mengalah)

Yielding memiliki artian pihak yang berkonflik harus menurunkan aspirasinya sendiri, namun penurunan aspirasinya tidak keseluruhan total. Taktik ini bisa disebut juga sebagai konsesi parsial⁴⁶.

d. *Withdrawing* (Menarik Diri)

Withdrawing memiliki artian sebagai penghentian yang memiliki sifat usaha dalam mengatasi kontroversi yang bersifat permanen⁴⁷.

e. *Inaction* (Diam)

Inaction maupun *withdrawing* memiliki makna kedua belah yang berkonflik melibatkan usaha untuk mengatasi kontroversi yang dibuat, namun *incation* memiliki artian tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan dan upaya untuk penyelesaian kontroversi⁴⁸

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

⁴³ *Ibid.* Hlm. 56

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 56-57

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 57

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 58

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 58

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 59

Fokus penelitian dianggap memiliki peranan penting dalam penelitian karena hanya fokus dalam permasalahan yang sudah peneliti rumuskan agar tidak melebar dan tidak keluar konteks. Penelitian ini untuk mengacu pada masalah konflik relasi yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023, awal masalahnya terdengar ke penjurur daerah karena terdapat adanya laporan ke polisi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Bojonegoro. Selain itu, peneliti ingin mengetahui awal mula konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro mengingat dalam hal ini juga terjadi permasalahan mengenai kekuasaan yang hanya terpusat pada Bupati saja, lalu fokus selanjutnya ingin mengetahui implikasi dari konflik yang terjadi terhadap relasi partai kedua pihak yang berkonflik, dan siapa yang menjadi pihak penengah dari konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Fokus penelitian tersebut nantinya akan peneliti analisis secara mendalam dengan menggunakan teori konflik.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini memberikan gambaran bahwa peneliti disini sangat memberikan peranan yang cukup penting untuk mengulas lebih dalam dari proses & hubungan, simbol, makna, interpretasi, dan menelaah relevansinya dengan cakupan fenomena politik yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif tentunya terdapat beberapa keunggulan yang didapatkan oleh peneliti yakni peneliti lebih leluasa dalam melakukan penelitian secara mendalam dari segi menggambarkan perilaku, sikap, hubungan terjadinya peristiwa dalam politik, dan interaksi yang peneliti dan informan lakukan. Penelitian kualitatif juga memiliki fokus pada terjadinya suatu peristiwa yang terjadi, lalu adanya penjelasan dari proses peristiwa tersebut dan tanggapan yang diberikan, selanjutnya peneliti akan menganalisis adanya permasalahan yang terjadi karena peristiwa politik, dan akhirnya akan menghasilkan penemuan baru yang ada pada ranah pengetahuan empiris. Maka dari itu, penelitian kualitatif ini memiliki sifat yang deskriptif dalam analisisnya, instrument utama adalah peneliti dan semuanya bergantung pada instrument utama dalam hal mengumpulkan sampai menganalisis data penelitian ⁴⁹.

Terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada metode penelitian kualitatif, diantaranya: (1) dalam metode kualitatif sangat memfokuskan pada fenomena yang sedang berlangsung, (2) penelitian kualitatif memiliki sebuah instrument utama yakni peneliti, peneliti memiliki peran dan fungsi sebagai pihak yang mengumpulkan data dan menganalisis

⁴⁹ Siti Aminah, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

data, (3) kualitatif secara langsung harus melakukan terjun lapangan sehingga peneliti terlibat langsung dalam hal fenomena yang terjadi dan lingkungan yang alami, (4) memiliki sifat yang induktif, terdapat beberapa sifat dari kualitatif yakni; diawali dengan adanya pembentukan abstraksi, lalu mengarah kepada konsep yang sesuai atau teori, penelitian ini juga menghasilkan bentuk yang deskriptif dalam penjabarannya, dan yang terakhir kategori, tema, konsep, dan pembentukan hipotesis.⁵⁰

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian terdapat hal yang memiliki peranan penting seperti informan atau narasumber. Informan tersebut sangat dibutuhkan karena dapat membantu peneliti dalam melakukan penyelesaian penelitian karena dengan adanya informan peneliti akan mendapatkan sebuah data maupun informasi yang akurat. Maka peneliti menentukan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd. selaku Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023
2. Sukur Priyanto, S.E., M.AP. selaku Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro
3. M. Zainudin selaku Wakil Ketua DPC PKB Bojonegoro
4. Drs. Supriyadi selaku Kader PDIP Bojonegoro

Terdapat empat informan yang peneliti pilih. Pertama kali peneliti bertemu dan wawancara bersama Bapak Sukur Priyanto selaku Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro tanggal 1 Februari 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di kediaman beliau, selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama M. Zainuddin selaku Wakil Ketua DPC PKB Bojonegoro pada tanggal 3 Februari 2022, pukul 09.00 yang bertempat di kantor DPC PKB Bojonegoro di Jl. Basuki Rahmat No.19, Jamban, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 10.00 WIB peneliti bertemu dan melakukan wawancara bersama bapak Drs. Supriyadi yang bertempat di salah satu ruang diskusi di Bojonegoro. Dan yang terakhir, peneliti bertemu dan wawancara dengan Bapak Budi Irawanto selaku wakil Bupati Bojonegoro pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 10.00 WIB, di rumah dinas beliau Jl. Panglima Sudirman No.53-71, Klangon, Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

⁵⁰ *Ibid.*

Wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih, wawancara dilakukan secara bertatap muka langsung bersama sang informan. Wawancara sangat dibutuhkan untuk mencari data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan menggunakan pengumpulan data wawancara, tentunya data yang dihasilkan akan lebih akurat karena hal tersebut dilakukan secara tatap muka dan data yang digali oleh peneliti akan lebih mendetail. Wawancara juga bisa digunakan untuk meneliti lebih dalam mengenai subjek yang berkonteks khusus ataupun umum. Dalam hal ini, teknik wawancara juga bisa menyinggung mengenai topik yang sensitif tetapi dalam hal ini diperlukan persiapan yang tepat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tidak hanya dilakukan sekali, tetapi wawancara bisa dilakukan berulang kali didasari dengan perkembangan yang terjadi. Dengan melakukan wawancara tentunya dapat menelaah dalam menilai bentuk kualitas dalam tanggapan pihak informan. Penilaian ini dilakukan dengan melihat tanggapan dari informan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan⁵¹. Peneliti melakukan wawancara dengan empat orang yakni:

1. Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd. selaku Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023
2. Sukur Priyanto, S.E., M.AP. selaku Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro
3. M. Zainudin selaku Wakil Ketua DPC PKB Bojonegoro
4. Drs. Supriyadi selaku Kader PDIP Bojonegoro

Keempat informan yang telah dimintai keterangannya adalah orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan konflik yang terjadi. Maka dalam melakukan wawancara ini Dalam melakukan wawancara, tentunya pihak pewawancara harus sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dengan membuat pedoman wawancara yang sudah disiapkan, pedoman wawancara sangat berguna agar peneliti dapat menyaring apa saja yang akan ditanyakan dan berfokus terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti dalam instrument pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan recorder hp dan buku catatan.

Wawancara bisa dianggap fleksibel karena dapat dilakukan dimana saja tergantung kesepakatan pewawancara dengan informan. Dengan menggunakan visual wajah yang ramah, senyum, atau anggukan kepada informan tentunya dapat membuat penilaian atau kesan yang baik⁵². Jika dilihat dari praktiknya pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya akan berkembang sesuai dengan tanggapan dari informan. Wawancara adalah sebagai solusi dalam mendapatkan sebuah jawaban yang bisa membantu peneliti dalam penelitian. Dengan

⁵¹ Adhi Kusumastuti, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 118.

⁵² *Ibid*, hlm. 119.

melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, tentunya akan memperoleh hasil maupun data-data yang dibutuhkan. Memperoleh data dengan wawancara tentunya akan jauh lebih fokus dan spesifik dalam setiap aspek yang ingin diteliti.

5. Dokumen

Dokumen ini dipilih oleh peneliti untuk digunakan dalam teknik pengumpulan data karena dalam penelitian ini mengambil dari beragam sumber dokumen yakni seperti jurnal, buku-buku, majalah, internet, kajian pustaka, koran online, foto-foto, dan berbagai literature yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Tujuan dari teknik pengumpulan data dokumentasi adalah untuk memperluas sumber-sumber pengumpulan data yang tentunya untuk lebih memahami dan medalami suatu subjek dan obyek yang menjadi bahasan. Data dari dokumentasi ini digunakan sebagai data pelengkap dalam menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan berfokus pada realitas yang ada dalam penelitian ini.

1.7.5 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang dihasilkan langsung oleh peneliti melalui subjek penelitian. Data primer ini dihasilkan dari wawancara mendalam lalu pengamatan langsung dilapangan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti sudah menerima seluruh informasi maupun data-data yang dikumpulkan selaras dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ke informan. Data primer sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian karena dari data yang diterima akan menghasilkan hasil yang terbilang akurat dalam pengambilan keputusan karena subjek wawancara yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan topik penelitian yang akan dikerjakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data pelengkap. Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai bentuk seperti dari Undang-Undang, Perda, maupun literatur-literatur yang senada dengan topik pembahasan penelitian. Dalam hal ini, peneliti dalam mencari data sekunder tidak perlu sampai terjun dilapangan karena memang data ini bisa diperoleh dari sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan yang akan diteliti. Data sekunder juga bisa menghemat tenaga maupun dana dari peneliti. Namun, dalam hal ini tentu saja ada kelemahan pada data sekunder yakni bias, kadaluarsa, maupun dalam perolehannya

dilakukan secara tidak benar. Tetapi peneliti harus melakukan identifikasi ataupun memperbaiki mengenai permasalahan yang terjadi tersebut.⁵³

1.7.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data dimulai ketika peneliti sudah mengumpulkan keseluruhan data yang sudah didapatkan. Peneliti akan memulai untuk melakukan pengaturan data yang dimulai dari membaginya dalam beberapa kategori atau pola, selanjutnya peneliti tentu harus menganalisis lebih dalam mengenai hubungan antar kategori atau pola tersebut. Dalam penelitian kualitatif, usaha dari menganalisis data adalah bentuk dari pemaknaan yang dilakukan oleh peneliti⁵⁴. Terdapat tiga tahap dalam melakukan analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya;

1. Reduksi Data

Dalam melakukan reduksing data adalah menyaring, penyaringan data harus dilakukan oleh peneliti agar data yang masuk sesuai dengan bahasan rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahapan seperti menelaah lebih dalam catatan-catatan yang sudah dibuat lalu dibuat pada inti datanya, merangkum semua data yang sudah diperoleh, lalu mengkaitkan hubungan-hubungan dari data-data yang sudah diperoleh oleh peneliti, dan yang terakhir adalah memadukan hubungan relevansinya dengan penelitian yang diangkat. Sebenarnya, terdapat tujuan pokok dari reduksing data adalah bentuk penyederhanaan data yang sudah peneliti lakukan.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya adalah peneliti akan melakukan sebuah klasifikasi dari data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan dengan data yang sudah ada dengan melakukan penyajian data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah diajukan. Sebenarnya penjaian data dalam kualitatif deskriptif adalah untuk penyederhaan. Penyederhanaan data dilakukan untuk menghindari data-data yang dianggap berbelit-belit dari proses analisis. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penyajian data dan mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

⁵³ Siti Aminah, op.cit. hlm. 106

⁵⁴ J.W Craswell, *Reseach Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)

Tahapan ini adalah tahapan akhir yang dilalui oleh peneliti dalam melakukan penyelesaian analisis data. Tahapan ini mengharuskan peneliti untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat dan harus merelevansikan dengan subyek sampai konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)